

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Menu



Ketika Bahasa Menjadi Senjata

Menjaga kewarasan berbahasa adalah salah satu kunci penting merawat kohesi sosial dan memastikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat.

Audio Berita 12 menit

Oleh Yoseph Yapi Taum
18 Mei 2025 08:00 WIB · Buku

Bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, sering kali dipahami sebatas alat komunikasi, medium penyampai pesan. Namun, di balik fungsinya yang tampak netral, bahasa menyimpan kekuatan dahsyat. Ia bukan sekadar kata-kata, melainkan instrumen kekuasaan yang mampu membentuk realitas sosial, mengukuhkan identitas, sekaligus menyingkirkan entitas yang dianggap "liyan".

Dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana diskursus publik, terutama yang bersinggungan dengan isu agama dan minoritas, kerap diwarnai oleh penggunaan bahasa yang berpotensi memarginalkan. Karena itu, kehadiran buku *Kekerasan Linguistik: Bagaimana Bahasa Mengeliminasi Kelompok Minoritas* karya Fariz Alnizar menjadi sebuah kajian penting dan relevan.

Buku ini mengajukan tesis bahwa bahasa, khususnya dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, dapat berfungsi sebagai alat kekerasan simbolik. Kekerasan ini, meski tak kasatmata memiliki dampak nyata dalam proses eksklusi dan "eliminasi" kelompok minoritas dari ruang sosial dan diskursus publik. Alnizar menggabungkan dua pendekatan, yaitu analisis wacana kritis (AWK) Foucauldian tentang kekuasaan dan teori kekerasan dalam studi perdamaian dan konflik (Coady dan Galtung). Dengan demikian, buku ini tidak hanya mengidentifikasi "masalah" bahasa, tetapi juga secara tidak langsung menantang pembaca untuk merefleksikan bagaimana bahasa turut berkontribusi pada iklim sosial yang ada.

Baca Juga

Dialektika Politik dan Kebohongan

Dari personal ke otoritatif

Pengantar Dr Saskia Schafer dalam buku ini patut digarisbawahi. Ia memaparkan sudut pandang teoretis yang esensial untuk memahami kekerasan linguistik sebagai kerangka kajian minoritas beragama. Schafer menyoroti evolusi fatwa yang, menurut dia, telah mengalami perubahan drastis secara global. Dari yang semula anjuran legal personal dari imam setempat, yang boleh diterima ataupun ditolak, fatwa kemudian

berkembang menjadi instrumen otoritas yang lebih besar bagi banyak kalangan.

Di Indonesia, khususnya pasca-1998, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan fatwa untuk menyebarkan pandangan otoritatifnya atas persoalan-persoalan akidah, minoritas, sekularisme, dan pluralisme. Konteks historis dan institusional ini menjadi krusial untuk memahami mengapa fatwa MUI menjadi salah satu fokus utama analisis Alnizar.

Posisi teoretis yang ditawarkan Alnizar ini membuka jalan bagi para linguis Indonesia untuk menganalisis berbagai bentuk teks otoritatif lainnya, seperti peraturan hukum atau pidato politik, dari perspektif kekerasan linguistik dan dampaknya pada kelompok rentan. Model ini sekaligus menyoroti pentingnya literasi kritis terhadap wacana kekuasaan.

Salah satu studi kasus sentral dalam buku ini adalah fatwa MUI terkait Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). JAI merupakan sebuah aliran dan organisasi yang berasal dari Asia Selatan abad ke-19 dan telah memiliki pengikut di Nusantara sejak tahun 1920-an, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selama bertahun-tahun, para pengikut Ahmadiyah hidup berdampingan secara normal dan wajar dengan umat beragama lainnya. Latar belakang ini penting untuk menunjukkan bahwa status "menyimpang" yang kemudian dilekatkan pada Ahmadiyah bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sebuah konstruksi sosial-religius.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Perubahan signifikan terjadi setelah keluarnya fatwa-fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, seperti fatwa tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qadiani dan fatwa tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah. Sejak fatwa-fatwa tersebut, terlebih pascaperistiwa penyerangan, kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, warga Ahmadiyah menerima status baru sebagai 'minoritas' yang berbeda pandangan dengan arus utama (*mainstream*).

Serial Artikel

Pelacur dan Kekerasan Simbolik

Oleh dunia maskulin, kata “pelacur” terus dipertahankan hanya karena kata inilah yang dianggap ampuh untuk menjatuhkan martabat perempuan serendah-rendahnya. Ini bentuk kekerasan simbolik yang selama ini dibiarkan.



[Baca Artikel >](#)

Fatwa ini berdampak teologis juga sosial, bahkan fisik. Dalam masyarakat, muncul perdebatan mengenai hubungan kausalitas antara fatwa anti-Ahmadiyah dan meningkatnya iklim intoleransi serta kekerasan di Indonesia. Sejumlah akademisi meyakini fatwa tersebut berperan dalam melegitimasi kekerasan, sementara kalangan lain berpendapat tidak ada hubungan kausalitas yang jelas. Menghadapi perdebatan ini, Alnizar memberikan perspektif kajian akademis yang menempatkan fatwa dalam konteks komunikasi agama-politik.

Mekanisme linguistik

Alnizar membedah mekanisme linguistik fatwa MUI tersebut, mengidentifikasi adanya dua ranah kekerasan linguistik: bentuk halus (*subtle form*) dan bentuk kasar (*abusive form*). Dalam merumuskan fatwanya, MUI menggunakan bahasa yang memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi, yang bertujuan menciptakan jarak sosial antara produsen teks (MUI) dengan konsumen teks yang menjadi sasaran fatwa (Ahmadiyah), sekaligus menegaskan superioritas otoritas. Kosakata yang digunakan dalam fatwa mengandung pola klasifikasi dan kata-kata ideologis yang secara inheren mengategorikan Ahmadiyah sebagai "sesat" atau "menyimpang". Alnizar menyoroti penggunaan proses leksikal, relasi makna, ekspresi eufemistik, dan diksi formal. Kajian yang cermat terhadap diksi yang membingkai Ahmadiyah ini menegasi pendekatan *religious essentialism* yang memandang fatwa sebagai produk agama yang harus dihormati

Penggunaan modus imperatif dalam fatwa MUI juga menunjukkan bahwa produsen teks ingin menegaskan otoritasnya yang dituangkan dalam bentuk perintah dan larangan dalam diktum fatwa. Ironisnya, penggunaan bahasa formal dan "halus" dalam fatwa justru bisa lebih berbahaya daripada ujaran kebencian yang terang-terangan. Formalitas dan eufemisme dapat menyelubungi sifat opresif dari teks, membuatnya tampak sah dan sulit ditentang, sementara secara efektif mendehumanisasi dan meminggirkan target.

Fatwa MUI, dengan bahasa formalnya, menciptakan kesan otoritas, obyektivitas, dan keabsahan religius. Namun, di balik formalitas itu, terdapat pilihan kata dan struktur kalimat yang secara sistematis mendefinisikan Ahmadiyah sebagai "liyan" yang berbahaya dan harus ditindak. Ini adalah bentuk kekerasan linguistik yang *subtle*, tetapi sangat efektif dalam melegitimasi diskriminasi dan bahkan kekerasan fisik karena ia bekerja pada level wacana yang dianggap "resmi" dan "benar". Hal ini menyoroti bahaya dari bahasa teknis atau birokratis yang digunakan oleh institusi mana pun untuk menjustifikasi tindakan yang merugikan kelompok tertentu.

Baca Juga

**Masyarakat Sipil Kecam Larangan Kegiatan Jemaah
Ahmadiyah di Kuningan**

Kekerasan tidak selalu berteriak. Ia bisa berbisik melalui diksi formal dan klausa imperatif. Ini juga berarti bahwa upaya melawan kekerasan

semacam ini memerlukan dekonstruksi wacana yang cermat, bukan hanya penolakan emosional.

Kedalaman kajian Alnizar terasa melampaui apa yang biasa ditemukan dalam studi ilmu sosial pada umumnya. Hal ini tampak dari kemampuannya meneroka bagaimana otoritas agama-politik Islam merumuskan klaim mereka, termasuk kerangka acuan, referensi, dan kosakata yang mereka gunakan. Detail-detail linguistik yang dianalisis tidak berhenti sebagai temuan tekstual semata, tetapi dikaitkan dengan konteks sosial-politik yang lebih luas.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

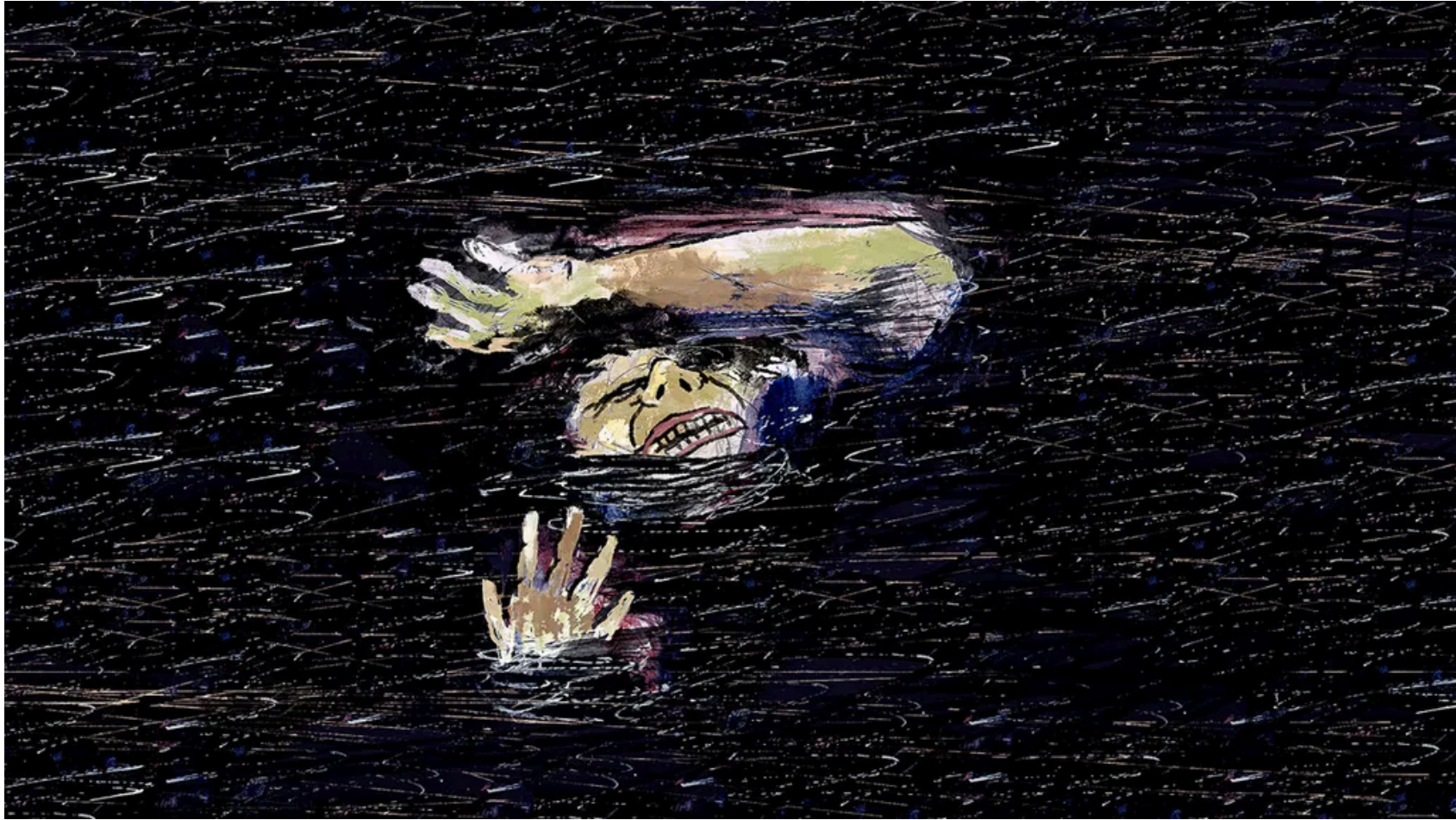
Pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme perumusan klaim oleh otoritas ini menjadi penting untuk memastikan perjalanan panjang bangsa Indonesia di jalan demokrasi. Keterkaitan antara analisis mikro linguistik (seperti pilihan kata dalam fatwa) dan isu makro (perjalanan demokrasi bangsa) menunjukkan bahwa praktik berbahasa sehari-hari, terutama oleh institusi berpengaruh, memiliki konsekuensi politik yang signifikan.

Ketika Alnizar menganalisis detail linguistik fatwa dan fatwa tersebut berdampak pada perlakuan terhadap kelompok minoritas, maka jelas bahwa perlakuan terhadap minoritas adalah salah satu barometer penting bagi kesehatan demokrasi. Dengan demikian, cara otoritas agama-politik

berbahasa secara langsung mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Buku ini, secara tidak langsung, menyerukan sebuah reformasi diskursif.

Urgensi pesan

Keunggulan buku ini terletak pada analisisnya yang tajam, metodologinya yang inovatif, serta keberaniannya mengangkat isu sensitif dengan argumentasi akademis yang kokoh. Pendekatan interdisipliner yang digunakan Alnizar memberikan pemahaman lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana fatwa beroperasi dalam masyarakat, melampaui perdebatan sederhana tentang ada atau tidaknya kausalitas langsung antara fatwa dan kekerasan.



Temuan buku ini memiliki implikasi serius bagi upaya membangun demokrasi yang inklusif dan masyarakat yang pluralis di Indonesia. Kekerasan linguistik terhadap minoritas adalah ancaman nyata bagi nilai-nilai luhur kebangsaan dan kemanusiaan.

Lebih dari sekadar kritik, studi ini juga menawarkan saran konstruktif yang penting: fatwa, sebagai sebuah opini tentang hukum (*legal opinion*), seharusnya dituangkan dalam rumusan yang tidak menggunakan bahasa opresif dan ofensif. Penggunaan diksi yang opresif dan ofensif, menurut Alnizar, dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan yang berada di luar kontrol produsen teks.

Rekomendasi ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan sebuah prasyarat untuk memutus siklus kekerasan yang kerap dimulai dari bahasa. Hal ini juga menyiratkan perlunya sebuah refleksi, bahkan reformasi internal, dalam institusi-institusi yang mengeluarkan fatwa atau produk linguistik serupa yang memiliki dampak publik.

Buku Fariz Alnizar ini bukan hanya sebuah bacaan akademis yang mencerahkan, tetapi juga sebuah panggilan mendesak bagi segenap elemen bangsa—otoritas keagamaan, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan individu—untuk merenungkan temuan-temuannya. Ia mengajak kita mempertimbangkan kembali pentingnya penggunaan bahasa yang bertanggung jawab, adil, dan menghargai kemanusiaan dalam setiap diskursus publik.

Menjaga kewarasan berbahasa adalah salah satu kunci penting demi merawat kohesi sosial dan memastikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat.

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melanjutkan

Iklan

Yoseph Yapi Taum

Sastrawan; Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Data Buku

Judul buku : Kekerasan Linguistik: Bagaimana Bahasa Mengeliminasi Kelompok Minoritas

Penulis : Fariz Alnizar

Pengantar : Dr. Saskia Schafer (Senior Researcher Humboldt-Universitas Zu Berlin)

Penerbit : Penerbit Buku Kompas

Tahun terbit : Cetakan I, 2025

Tebal buku : 280 halaman

ISBN : 978-623-34699-1-3

Yoseph Yapi Taum

resensi buku

Kekerasan Linguistik

Fariz Alnizar

Penerbit Buku Kompas

Fatwa MUI

Jamaah Ahmadiyah

utama

SDGs

SDG13-Penanganan Perubahan Iklim

SDG05-Kesetaraan Gender

Kerabat Kerja

Penulis: Yoseph Yapi Taum | **Editor:** Yohanes Krisnawan | **Penyelarasa Bahasa:** Apolonius Lase

Komentar Pembaca

Belum Ada Komentar

Tulis Komentar

Komentar Anda..



Kirim